

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

I Gusti Bagas Satria Darma¹, Muhamad Alifh², Pascal Aria Novarossi³, Diafa Zati Khulwani⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: 010122051@student.unpak.ac.id¹, 010122015@student.unpak.ac.id²,
010122158@student.unpak.ac.id³, 010122046@student.unpak.ac.id⁴,
Farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstract

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten, meskipun banyak negara maju menghadapi tantangan pertumbuhan yang negatif. Kebijakan fiskal, sebagai instrumen pengelolaan pengeluaran dan perpajakan, berperan penting dalam memelihara stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyoroti dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang bijaksana dalam mendukung sektor-sektor kunci seperti infrastruktur dan industri. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dan efisien dari kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia*

Abstract

Indonesia's economic growth exhibits a consistent positive trend, even as many developed countries face negative growth challenges. Fiscal policy, as an instrument for managing expenditure and taxation, plays a crucial role in maintaining economic stability and enhancing societal welfare. This research highlights the impact of government spending on economic growth, emphasizing the importance of prudent fiscal policies in supporting key sectors such as infrastructure and industry. Findings indicate that effective and efficient management of fiscal policies can promote sustainable and inclusive economic growth in Indonesia.

Keywords: *Fiscal Policy, Economic Growth, Indonesia*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan ini berperan dalam mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek dan juga memberikan dampak jangka panjang terhadap penawaran agregat, melalui peningkatan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan output dari waktu ke waktu, adalah salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.

Kebijakan fiskal sendiri melibatkan pengelolaan pengeluaran pemerintah dan pengaturan tarif pajak untuk memantau serta mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan moneter, di mana otoritas moneter, seperti bank sentral, mempengaruhi jumlah uang yang beredar di suatu negara. Di Indonesia, sistem kebijakan fiskal telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global dan domestik. Sebagai contoh, kebijakan anggaran berimbang yang diterapkan pada masa Orde Baru bertujuan untuk menangani masalah hiper-inflasi yang melanda negara pada saat itu.

Pengaruh signifikan kebijakan fiskal terhadap perekonomian pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, tetapi juga dapat

menghasilkan dampak berganda atau multiplier effect, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Studi Bank Indonesia (2009) mendukung pandangan ini, dengan menyebutkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat, namun dapat pula bersifat pro-siklikal tergantung pada pengelompokan pengeluaran. Sifat pro-siklikal ini berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi, seperti peningkatan inflasi.

Sejarah mencatat bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama melalui kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan tingkat pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah Indonesia adalah perpajakan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah, sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pengeluaran sebagai bagian dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama pada sektor-sektor ekonomi.

Tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia, akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan, namun pada 2022, pasar saham Indonesia mampu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kebijakan fiskal yang diambil selama pandemi, termasuk berbagai program perlindungan sosial untuk keluarga miskin dan rentan, menjadi prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan berakhirnya status darurat COVID-19 oleh WHO, dunia kini menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Tantangan-tantangan besar yang akan dihadapi perekonomian global dalam beberapa tahun mendatang meliputi ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi digital yang cepat, perubahan iklim beserta kebijakan yang menyertainya, serta potensi munculnya pandemi di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peraturan perpajakan, dan laporan-laporan ekonomi dari lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Data-data ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal diterapkan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, studi literatur digunakan untuk mengkaji teori-teori ekonomi dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Literatur yang dianalisis meliputi jurnal-jurnal akademik, buku-buku ekonomi, serta laporan penelitian dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Studi ini akan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan kondisi ekonomi Indonesia untuk melihat relevansi dan implikasi kebijakan fiskal yang diterapkan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika kebijakan fiskal di Indonesia, serta dampaknya terhadap ekonomi. Hasil analisis dari dokumen dan literatur diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara, terutama melalui pajak, digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal memainkan peran sentral dalam kebijakan ekonomi makro, dengan tujuan utama mencapai

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, serta kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Fungsi kebijakan fiskal dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Pertama, fungsi alokasi, yaitu kebijakan yang digunakan untuk alokasi sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kedua, fungsi distribusi, yang berfokus pada upaya pemerataan pendapatan melalui subsidi dan program bantuan sosial. Ketiga, fungsi stabilisasi, di mana kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan krisis global.

Secara umum, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara melalui pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal berbeda dari kebijakan moneter, yang berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar serta suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Sementara kebijakan fiskal lebih bertumpu pada instrumen seperti belanja pemerintah dan penerimaan pajak, dengan tujuan memengaruhi permintaan agregat, tingkat aktivitas ekonomi, dan distribusi pendapatan di masyarakat.

Kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah untuk memengaruhi berbagai variabel ekonomi, seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat pengangguran, investasi, dan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan kebijakan ini, pemerintah dapat menentukan arah perekonomian agar mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sejarah dan Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal modern dikembangkan dari pemikiran seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes, yang memaparkan teorinya dalam buku berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money* pada tahun 1936. Pemikiran Keynes muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi besar atau *Great Depression* yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an, yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi dan stagnasi ekonomi. Keynes menentang pandangan teori ekonomi klasik yang pada saat itu menganggap bahwa pasar dapat menyesuaikan diri secara otomatis dan mencapai *full employment* (lapangan kerja penuh).

Teori klasik berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah justru akan mengurangi pengeluaran swasta, karena dianggap mengalihkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Namun, Keynes melihat bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat penting untuk mendorong perekonomian, terutama saat sektor swasta tidak mampu meningkatkan permintaan secara signifikan. Dalam situasi krisis, Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat menstimulasi aktivitas ekonomi melalui apa yang dikenal sebagai multiplier effect, di mana belanja pemerintah dapat meningkatkan total permintaan agregat dan memperbaiki perekonomian secara keseluruhan.

Pemikiran Keynes inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan fiskal modern, di mana peran aktif pemerintah dalam perekonomian diakui sebagai faktor penting untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan pengeluaran atau pengurangan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sementara kebijakan yang lebih restriktif, seperti penurunan pengeluaran atau peningkatan pajak, dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi ketika ekonomi terlalu panas. Kebijakan fiskal merupakan alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian. Melalui instrumen perpajakan dan belanja, pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pandangan Keynesian yang mendukung intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal terus relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis dan kompleks.

Kebijakan Fiskal Indonesia

Kebijakan fiskal Indonesia tahun 2024 menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, baik dari segi geopolitik, ekonomi, maupun perubahan iklim. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024, yang disusun pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berperan penting dalam perencanaan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dokumen ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai penutup dari dua periode pemerintahan yang berhasil mengelola berbagai tantangan domestik dan global.

Dalam kurun waktu 2014-2024, Indonesia telah menghadapi berbagai guncangan ekonomi dunia, seperti perlambatan ekonomi global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pengetatan kebijakan moneter global, hingga pandemi COVID-19. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi global melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,1 persen, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (4,2 persen). Namun, Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhannya, dengan rata-rata sebesar 5,4 persen sebelum pandemi, yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara G20 lainnya.

Perkembangan Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Global

Pada tahun 2024, Indonesia menghadapi dinamika global yang semakin menantang. Perang di Ukraina, kenaikan harga komoditas global, inflasi yang tinggi, serta perubahan iklim yang semakin nyata menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Dalam kondisi ini, kebijakan fiskal Indonesia terus berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah berhasil menjaga kinerja ekonomi dengan mengoptimalkan belanja negara dan menerapkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global.

Sejak awal pandemi COVID-19 pada akhir 2019, perekonomian Indonesia mengalami penurunan tajam, terutama pada kuartal kedua tahun 2020, ketika Produk Domestik Bruto (PDB) mencatatkan kontraksi sebesar 5,32 persen. Pada kuartal berikutnya, meskipun terdapat peningkatan, Indonesia resmi mengalami resesi dengan dua kuartal berturut-turut mencatatkan pertumbuhan negatif. Kebijakan fiskal selama periode krisis ini berfokus pada penyediaan stimulus ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat terdampak, serta menjaga stabilitas sektor-sektor kunci seperti kesehatan dan infrastruktur.

Peran Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi

Kebijakan fiskal selama pandemi terbukti memainkan peran kunci dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kegiatan ekonomi di tengah pembatasan mobilitas yang diterapkan. Meskipun pertumbuhan ekonomi menurun drastis pada awal pandemi, dukungan fiskal yang diberikan berhasil mendorong pemulihan bertahap di berbagai sektor ekonomi.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah melalui kebijakan *countercyclical* atau kebijakan fiskal yang responsif terhadap siklus ekonomi. Ketika ekonomi mengalami perlambatan, pemerintah meningkatkan pengeluaran publik untuk mendorong permintaan agregat. Pada tahun 2024, pemerintah terus mempertahankan kebijakan ini dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dan pendidikan.

Tantangan Kebijakan Fiskal di Masa Depan

Setelah pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim dan krisis energi global memerlukan penyesuaian dalam kebijakan fiskal untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, seperti perang Rusia-Ukraina, turut memberikan tekanan pada perekonomian global yang berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan.

Kebijakan fiskal Indonesia ke depan juga harus mampu menjawab tantangan terkait ketahanan pangan dan transisi energi. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk investasi hijau, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon. Langkah-langkah ini penting dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat memengaruhi sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pertanian dan kelautan.

Kebijakan fiskal Indonesia tahun 2024 menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Pemerintah berhasil menjaga ketahanan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang adaptif, termasuk dalam masa pandemi COVID-19. Tantangan ke depan, seperti ketegangan

geopolitik dan perubahan iklim, memerlukan kebijakan fiskal yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Fokus pada reformasi struktural, penguatan investasi hijau, serta peningkatan daya saing ekonomi akan menjadi agenda penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Kebijakan Jangka Pendek Menyikapi Tantangan dan Membangun Fondasi Transformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal jangka pendek diarahkan untuk merespons tantangan mendesak sekaligus membangun dasar yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia fokus pada empat aspek penting, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Salah satu prioritas utama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, yaitu mereka yang pengeluarannya di bawah USD 1,9 per hari (sekitar Rp322.170 per bulan). Upaya ini terus menunjukkan hasil positif. Antara tahun 2014 hingga 2022, kemiskinan ekstrem berhasil berkurang dengan rata-rata penurunan sebesar 12,64%. Meski demikian, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai.

2. Akselerasi Penurunan Stunting

Penurunan prevalensi stunting menjadi fokus kedua dengan target 14% pada tahun 2024. Meskipun prevalensi stunting terus menurun selama dekade terakhir, percepatan tambahan diperlukan. Pemerintah tidak dapat lagi menjalankan program seperti biasa (*business as usual*) untuk mencapai target tersebut. Penyebab utama stunting di Indonesia antara lain terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya asupan gizi yang memadai, dan terbatasnya ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur kesehatan serta meningkatkan akses pada makanan bergizi seperti susu, telur, dan daging untuk ibu hamil dan anak-anak.

3. Pengendalian Inflasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi

Mengendalikan inflasi menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan global akibat perang Rusia-Ukraina yang mengganggu perdagangan internasional. Lonjakan harga komoditas internasional menyebabkan tekanan inflasi global, namun Indonesia berhasil meredam sebagian dampak tersebut. Kinerja ekonomi yang tetap kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022, menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu langkah penting dalam menjaga inflasi adalah kebijakan subsidi energi dan kompensasi untuk BBM, yang dirancang untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap harga domestik. Kebijakan ini diimplementasikan guna meredam tekanan inflasi dari harga yang diatur pemerintah (*administered prices*).

4. Peningkatan Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Investasi memainkan peran sentral dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan pemerintah terus mendorong peningkatan penanaman modal di berbagai sektor, terutama energi dan pertambangan. Untuk tahun 2024, kebijakan fiskal diarahkan pada empat strategi utama: (i) memberikan insentif perpajakan seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction* untuk sektor-sektor prioritas; (ii) meningkatkan kemudahan berusaha dan kepastian hukum, termasuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja; (iii) mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas investasi; serta (iv) memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dengan berbagai insentif tersebut, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kebijakan jangka pendek yang berfokus pada empat pilar utama ini, pemerintah Indonesia berupaya mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing

Kebijakan fiskal jangka menengah Indonesia bertujuan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, dan mempercepat penerapan ekonomi hijau. Lima fokus utama berikut menjadi pilar kebijakan untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

1. Peningkatan Kualitas SDM (Human Capital)

Sumber daya manusia Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai daya saing global yang optimal. Tantangan ini termasuk rendahnya Human Capital Index (HCI), skor PISA yang belum signifikan meningkat, rata-rata lama sekolah (RLS) yang lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya, serta tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN sejak 2009. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan mencapai Rp612,2 triliun, meningkat 27,4% dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memperkuat program kesehatan ibu dan anak, deteksi dini penyakit, dan peningkatan layanan bagi lansia.

2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang masif terus menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi. Dari tahun 2019 hingga 2023, pemerintah rata-rata mengalokasikan Rp374,2 triliun per tahun untuk infrastruktur. Proyek besar yang telah dilaksanakan termasuk pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan jalan daerah sepanjang lebih dari 425 ribu kilometer. Selain itu, kapasitas listrik nasional juga meningkat sebesar 21,47 GW selama periode 2014-2021. Pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur akan lebih difokuskan pada konektivitas digital, energi, infrastruktur hijau untuk mitigasi perubahan iklim, serta penguatan infrastruktur untuk hilirisasi sumber daya alam.

3. Mendorong Aktivitas Ekonomi Bernilai Tambah Tinggi melalui Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam menjadi strategi utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Berbagai insentif fiskal telah disediakan, seperti pembebasan bea masuk impor, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin, tarif PPnBM nol persen, dan larangan ekspor bahan mentah. Pemerintah juga mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta memberikan fasilitas perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Selain itu, program Viability Gap Fund (VGF) dan Project Development Facility (PDF) turut mendukung skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

4. Reformasi Kelembagaan dan Simplifikasi Regulasi (Institutional Reform)

Reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Sejak tahun 2010, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, reformasi birokrasi di Indonesia telah dimulai. Pada fase ketiga yang berlangsung hingga tahun 2025, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, pengelolaan APBN dan APBD yang lebih efisien, serta perizinan yang lebih cepat dan tepat. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi prioritas untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dengan fokus pada percepatan adaptasi teknologi dan peningkatan efektivitas birokrasi.

5. Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy)

Kebijakan ekonomi hijau merupakan bagian penting dari arah pembangunan berkelanjutan. Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan, terutama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi target pengurangan GRK dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kesepakatan internasional terkait perubahan iklim. Pembangunan ekonomi hijau diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sambil

tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan kebijakan fiskal yang fokus pada penguatan SDM, infrastruktur, hilirisasi, reformasi kelembagaan, dan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi, mempercepat pertumbuhan, dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan di tengah tantangan global.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Sejumlah penelitian telah mengkaji dampak dari berbagai kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah.

1. Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Suryono dan Rusmin (2019), peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki konektivitas, serta mendorong investasi domestik dan asing. Misalnya, pembangunan jalan tol, jembatan, dan fasilitas publik lainnya akan mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja. Dampak positif ini pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian oleh Arfianto dan Siregar (2019) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak yang diterima pemerintah memungkinkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan kebijakan perpajakan yang tepat, pemerintah dapat mengelola anggaran secara efektif untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, kebijakan perpajakan yang tidak optimal, misalnya peningkatan pajak tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha, dapat menekan daya beli masyarakat dan investasi, sehingga berdampak negatif terhadap ekonomi.

3. Pengurangan Subsidi BBM dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Hapsari dan Anwar (2019) menunjukkan bahwa penurunan subsidi BBM dan listrik yang tiba-tiba pada tahun 2014 berdampak negatif terhadap ekonomi. Penghapusan subsidi menyebabkan kenaikan harga energi dan barang-barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Ini menyebabkan penurunan konsumsi domestik yang menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.

4. Efektivitas Kebijakan Fiskal Jangka Panjang

Siregar (2017) dalam penelitiannya mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia selama periode 2000-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang difokuskan pada pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, seperti birokrasi yang tidak efisien dan ketidaksesuaian kebijakan pusat dan daerah yang mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

5. Kebijakan Fiskal Berdasarkan DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)

Iskandar dan Husodo (2020) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan DSGE untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, terutama yang berfokus pada investasi dan konsumsi pemerintah, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini menekankan pentingnya stabilitas fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

6. Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam dan Perdagangan

Selain kebijakan umum, beberapa kebijakan spesifik juga mempengaruhi ekonomi, khususnya di sektor migas dan perdagangan:

- a. Pajak Ekspor Migas: Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak ekspor migas memberikan pemasukan penting bagi anggaran negara. Namun, ketergantungan pada migas juga dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
- b. Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Dana Cadangan Migas (DCM): Kontrak kerja sama antara pemerintah dan perusahaan migas serta Dana Cadangan Migas (DCM) berfungsi untuk mengelola pendapatan dari sektor migas dengan lebih terstruktur, sehingga pendapatan negara lebih stabil dan berkelanjutan.
- c. Pengendalian Impor dan Tarif Bea Masuk: Kebijakan pengendalian impor dan pemberlakuan tarif bea masuk bertujuan melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor produksi lokal. Kebijakan ini mendukung substitusi impor dan memacu pengembangan industri domestik.

SIMPULAN

Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif. Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, sementara kebijakan seperti pengurangan subsidi yang tiba-tiba bisa menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan. Efektivitas kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas fiskal dan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal sangat penting untuk menciptakan keterlibatan dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih mendukung kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas juga tidak dapat diabaikan, karena ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Keberhasilan kebijakan fiskal juga memerlukan dukungan dari sektor swasta. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan inovasi dari sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Dalam menghadapi tantangan global dan fluktuasi ekonomi, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan fiskal secara berkala. Penyesuaian yang tepat waktu akan memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perubahan eksternal dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan fiskal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristina, K., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. *Dinamic*, 2(2), 403-414.
- Amri, K. (2020). Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Bukti data panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152.
- Helianny, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In *Prosiding Seminar Stiami* (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21).
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161-175.
- Nizar, M. A. (2011). Siklikalitas kebijakan fiskal di Indonesia.

- Patnasari, Y. (2015). *Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rantebua, S., Ilmu, P., Pascasarjana, E., Halu, U., Kendari, O., & Suriadi, L. O. (2020). Analisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 5(1), 1-11.
- Sriwardiningsih, E. (2010). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia. *Binus Business Review*, 1(2), 307-318.
- Septiadi, D., & Suparyana, P. K. (2019). Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 13(2), 84-96.
- Sujai, M. (2011). Dampak kebijakan fiskal dalam upaya stabilisasi harga komoditas pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 297-312.
- Sudirman, I. W., & SE, S. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Siswajanthy, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360-4369.
- Suhartanto, F. P., Darmawan, M. F., Febriansyah, N., Nugraha, Z. F., Irawan, H. F., & Siswajanthy, F. (2024). Penerapan Ketentuan Kepailitan Terhadap Bank yang Bermasalah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 1-12.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Journal Business and Management*, 1(2), 77-88.